

Analisis Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

Oleh:

¹ Umiyati Haris; ² Hubertus Oja

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Musamus

Email. umiyatih12@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten dan dampaknya terhadap dinamika ekonomi politik serta pembangunan sosial di Kota Merauke. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif-analitik dan pengumpulan data melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan investasi yang dirancang belum berjalan optimal karena adanya kendala dalam komunikasi, sumber daya, dan birokrasi yang kompleks. Faktor-faktor tersebut menyebabkan lambatnya pelaksanaan program investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan pariwisata. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan dalam aspek koordinasi, struktur birokrasi, dan dukungan infrastruktur untuk mencapai efektivitas kebijakan yang lebih tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Merauke, berbagai faktor, seperti kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang masih kurang responsif, menghambat tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Ekonomi Politik; Pembangunan Sosial; Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Merauke Regent Regulation No. 142 on the Regency Investment General Plan and its impact on the dynamics of political economy and social development in Merauke City. Using a qualitative research method with descriptive-analytic analysis and data collection through literature study, this study found that the investment policy designed has not run optimally due to constraints in communication, resources, and complex bureaucracy. These factors cause the slow implementation of investment programs in strategic sectors such as agriculture and tourism. In the perspective of policy implementation theory, this study emphasizes the need for improvement in aspects of coordination, bureaucratic structure, and infrastructure support to achieve higher policy effectiveness. The conclusion of this study shows that the implementation of Merauke Regent Regulation No. 142 on the General Plan for Regency Investment has not been running optimally. Although this regulation has great potential to encourage economic growth and social development in Merauke, various factors, such as communication constraints, limited resources, and a bureaucratic structure that is still less responsive, hinder the achievement of the expected goals.

Keywords: Political Economy; Social Development; General Plan for Regency Investment

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi politik di Indonesia terus berkembang seiring perubahan kebijakan dan regulasi yang diadaptasi untuk menjawab berbagai tantangan

pembangunan sosial. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,17%, dengan kontribusi utama dari sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian, namun distribusi manfaatnya masih cenderung tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Hamid, 2023).

Pembangunan sosial di Indonesia turut dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi politik yang diimplementasikan di berbagai daerah, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup, akses kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan di berbagai wilayah bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Berbagai kebijakan otonomi daerah memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal, namun tantangan dalam implementasi kebijakan ini seringkali menghambat pencapaian tujuan pembangunan sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks ekonomi politik, pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investasi asing dan dalam negeri sebagai upaya mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Investasi di berbagai sektor, terutama infrastruktur dan energi, didorong untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi langsung pada semester pertama 2023 meningkat sebesar 17,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan adanya upaya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Indonesia (Fahra & Daniah, 2023).

Kota Merauke, sebagai salah satu wilayah di Papua yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan kelautan, menjadi pusat perhatian dalam dinamika ekonomi politik dan pembangunan sosial. Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, strategi investasi di Merauke difokuskan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat Merauke (*Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten*, 2022).

Namun, dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan rencana yang diharapkan. Terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang sulit, dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang manajemen investasi. Selain itu, kendala regulasi dan birokrasi sering menghambat arus investasi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pencapaian tujuan pembangunan sosial di wilayah tersebut (Zesa, 2024).

Berdasarkan evaluasi sementara, investasi di sektor-sektor utama belum sepenuhnya memenuhi target sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Banyak proyek yang masih dalam tahap perencanaan atau belum terealisasi secara optimal, yang menyebabkan potensi ekonomi Kota Merauke belum sepenuhnya tergali. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi agar kebijakan investasi tersebut dapat benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat setempat (Elisabeth, 2020).

Korelasi antara kebijakan publik dan dinamika ekonomi politik di Kota Merauke sangat erat, terutama dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor. 142 berperan penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menarik investor dan membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha lokal(Hermanto, 2017).

Dalam konteks ekonomi politik, kebijakan investasi di Kota Merauke harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan ekonomi lokal, seperti pengangguran dan kemiskinan, yang masih menjadi tantangan di wilayah tersebut. Jika kebijakan investasi ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan memperoleh dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, maka dinamika ekonomi politik di Merauke akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kendala dalam implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 serta untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi dinamika ekonomi politik dan pembangunan sosial di Kota Merauke. Dengan mengevaluasi kebijakan penanaman modal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang mampu mendorong peningkatan investasi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong tercapainya pembangunan sosial yang berkelanjutan di Kota Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif- analitik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi politik dan pembangunan sosial di Kota Merauke, khususnya terkait implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Melalui analisis deskriptif-analitik, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan investasi tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, buku, laporan pemerintah, regulasi, dan artikel media massa yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis, serta untuk memahami konteks ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanaman modal di Merauke. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kritis untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan mengacu pada data dan laporan dari instansi pemerintah terkait, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Kabupaten Merauke, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan investasi di daerah tersebut. Data dari lembaga-lembaga ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana kebijakan penanaman modal telah memberikan dampak pada dinamika ekonomi dan pembangunan sosial di Merauke, serta melihat kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dengan implementasinya di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan investasi di Kota Merauke. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut serta mengungkap faktor-faktor yang menghambat atau mendorong implementasi kebijakan di tingkat local. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk memberikan landasan ilmiah bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam menarik investasi dan membangun potensi ekonomi lokal di Merauke. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kebijakan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merauke, kondisi ekonomi di Kota Merauke menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pada tahun 2023, sektor pertanian dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Merauke, masing-masing sebesar 25% dan 15% (Jenia, 2022). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di Merauke ini menjadi indikasi adanya potensi ekonomi lokal yang besar untuk dikembangkan melalui investasi yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meskipun pembangunan sosial di Kota Merauke menghadapi berbagai tantangan, namun telah menunjukkan kemajuan di beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka di Merauke mengalami penurunan dari

5,6% pada tahun 2022 menjadi 5,2% pada tahun 2023 (Salindeho & Intan, 2024). Selain itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga telah dilakukan,

meskipun akses ke layanan dasar masih menjadi kendala di beberapa daerah terpencil di Merauke. Adanya dukungan kebijakan penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 diharapkan dapat semakin memperkuat aspek-aspek sosial ini melalui peningkatan investasi di sektor-sektor strategis.

Namun, tantangan dalam hal kesenjangan ekonomi dan sosial masih dirasakan oleh masyarakat di wilayah tertentu di Merauke, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan dan terpencil. Perbedaan akses terhadap peluang ekonomi serta pelayanan dasar antara kawasan perkotaan dan pedesaan menjadi isu yang memerlukan perhatian dalam kebijakan pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan yang ada (Martanto, 2022).

Dalam sisi ekonomi politik, upaya penanaman modal di Merauke diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi lokal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah. Walaupun demikian, pelaksanaan Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 ini masih menghadapi kendala teknis dan administratif yang menghambat optimalisasi investasi di lapangan

Penerapan Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten masih belum berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Sebagai contoh, sektor pariwisata yang menjadi salah satu fokus dalam peraturan tersebut belum berhasil menarik investasi yang signifikan. Beberapa destinasi wisata potensial di Merauke, seperti Pantai Lampu Satu dan Taman Nasional Wasur, belum mendapatkan perhatian investasi yang cukup untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Faktor aksesibilitas dan infrastruktur dasar menjadi kendala utama yang menyebabkan lambatnya kemajuan di sektor ini.

Di sektor pertanian, yang menjadi andalan ekonomi Merauke, kebijakan penanaman modal telah memberikan hasil yang cukup positif dengan peningkatan produksi beras dan komoditas lain. Namun, belum banyak investor besar yang tertarik untuk mengembangkan sektor pertanian ini ke tahap yang lebih modern dan terintegrasi, seperti yang diharapkan dalam Peraturan Bupati Merauke. Beberapa proyek yang direncanakan masih dalam tahap perencanaan atau tertunda akibat kendala administrasi dan kurangnya kemudahan perizinan (Maghdalena et al., 2022).

Dari hasil evaluasi sementara, implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa sektor penting seperti infrastruktur pendukung dan fasilitas layanan dasar belum mendapatkan dukungan investasi yang memadai. Hal ini menghambat potensi peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor yang diidentifikasi sebagai prioritas. Meskipun beberapa proyek telah dimulai,

sebagian besar masih dalam tahap perencanaan awal atau belum terealisasi sesuai target.

Kebijakan publik dalam konteks ekonomi politik bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan teori analisis kebijakan publik, kebijakan yang efektif harus memperhatikan tiga hal utama: formulasi kebijakan yang jelas, implementasi yang terukur, dan evaluasi yang berkelanjutan (Hermanto, 2022). Dalam kasus Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, formulasi kebijakan telah mencakup berbagai sektor penting seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Menurut teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks Merauke, komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku investasi tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pemahaman yang sama terkait tujuan dan teknis pelaksanaan kebijakan. Contohnya, beberapa sektor seperti pariwisata belum menerima investasi yang memadai, yang dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif mengenai potensi ekonomi pariwisata di Merauke (Yanti et al., 2024).

Faktor sumber daya juga menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan ini. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur pendukung, serta dukungan finansial yang memadai. Berdasarkan data di bagian hasil, sektor pariwisata dan pertanian belum mendapatkan dukungan infrastruktur yang cukup untuk memikat investor besar. Dalam teori kebijakan publik, keterbatasan sumber daya sering kali menjadi penghambat utama keberhasilan kebijakan, dan ini terlihat jelas di Merauke di mana banyak proyek investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memainkan peran krusial dalam implementasi yang sukses. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 memerlukan komitmen penuh dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa beberapa proyek penting masih tertunda akibat kurangnya dukungan dan keseriusan dalam implementasi. Dalam perspektif teori kebijakan, dukungan penuh dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana awal.

Struktur birokrasi yang kompleks seringkali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan di daerah. Di Merauke, proses perizinan yang dianggap masih berbelit-belit menghambat arus investasi, terutama bagi investor dari luar yang harus menempuh prosedur yang cukup panjang. Menurut teori Van Meter dan Van Horn

tentang implementasi kebijakan, struktur organisasi yang jelas dan responsif sangat diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif (Ulahayanan et al., 2024). Jika struktur birokrasi masih rumit dan tidak terintegrasi, maka upaya menarik investasi yang diharapkan dalam Peraturan Bupati Merauke tidak akan tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi politik, keterlambatan dalam implementasi kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor dan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan di daerah. Dalam teori ekonomi politik, stabilitas dan kepastian kebijakan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondisi ini juga tercermin dalam rendahnya minat investor di sektor pariwisata di Merauke, yang meskipun memiliki potensi besar, masih mengalami kendala investasi akibat berbagai hambatan birokrasi dan infrastruktur.

Kebijakan publik yang ideal haruslah adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal serta mampu mengakomodasi masukan dari masyarakat (Allisonia & Maulana, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan investasi di Merauke, meskipun memiliki tujuan yang baik, belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat. Berdasarkan perspektif teori kebijakan publik dari Dunn, keterlibatan masyarakat adalah faktor penting dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Di Merauke, keterlibatan masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan misalnya, dapat menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan kebijakan investasi.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah evaluasi kebijakan secara berkala. Dalam teori kebijakan publik, evaluasi adalah proses penting untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan (Samsu et al., 2024). Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Bupati Merauke Nomor 142, untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam penerapan kebijakan tersebut. Evaluasi ini penting agar pemerintah daerah dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan analisis ini, perbaikan dalam aspek komunikasi, keterbukaan birokrasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi hal yang mendesak untuk memperbaiki implementasi kebijakan penanaman modal di Merauke. Jika faktor-faktor ini dapat diperbaiki, maka kebijakan ini berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di daerah. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memastikan setiap kendala diatasi, terutama dalam hal koordinasi antar-pihak yang terlibat dalam investasi.

Implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena berbagai kendala yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek ini serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan

investasi di Merauke dapat lebih efektif dalam mendorong dinamika ekonomi politik yang stabil dan berkontribusi nyata pada pembangunan sosial masyarakat setempat. Hal ini akan menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Merauke. Secara konseptual, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat lokal. Dengan mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan yang ada, Pemerintah Kabupaten Merauke dapat memanfaatkan kebijakan penanaman modal ini sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pembangunan sosial yang merata di seluruh wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Merauke, berbagai faktor, seperti kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang masih kurang responsif, menghambat tercapainya tujuan yang diharapkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya minat investasi di sektor-sektor strategis, seperti pariwisata dan pertanian, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam peraturan tersebut. Secara keseluruhan, upaya peningkatan investasi di Merauke melalui kebijakan publik ini masih memerlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan di berbagai aspek, terutama dalam hal penyederhanaan prosedur, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan para investor akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini di masa mendatang. Dengan perbaikan yang terfokus pada hambatan-hambatan tersebut, kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Merauke.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sebagai saran dari hasil penelitian ini yakni: Pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap Peraturan Bupati Nomor 142, dengan fokus pada penyederhanaan prosedur dan penguatan sistem birokrasi. Untuk menarik lebih banyak investor, terutama di sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan pertanian, perlu ada perbaikan yang signifikan dalam hal kemudahan akses dan transparansi prosedur perizinan. Pemerintah harus memperkenalkan mekanisme yang lebih efisien dan ramah-investor, yang memungkinkan proses investasi berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan yang berlarut-larut. Selain itu, penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan calon investor harus ditingkatkan agar tercipta saling pengertian dan kepercayaan yang lebih baik. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, pemerintah perlu

memprioritaskan peningkatan infrastruktur dasar, terutama yang berkaitan dengan transportasi, energi, dan teknologi informasi, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor-sektor strategis. Penyediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pengembangan sektor-sektor yang potensial. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal juga harus menjadi fokus utama, dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan dan memberikan pelatihan agar mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan penanaman modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Merauke.

DAFTAR PUSTAKA:

- Elisabeth, A. (2020). Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fahra, T., & Daniah, R. (2023). Analisis Reaktivasi Perundingan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada Tahun 2019. *Interdependence: Journal of International Studies*, 4(2). <https://ijis.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/ijis/article/view/67>
- Hamid, P. (2023). Ekonomi Indonesia Kini dan Esok. Unhas Press.
- Allisonia, V., & Maulana, A. (2024). Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Triwikrama*, 3(12). <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/4132>
- Hermanto, H. (2017). Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Moi. *Animage*.
- Samsu, N., Husein, M., & Saprudin, S. (2024). Implementasi Kebijakan Gotong Royong Pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(2). <https://journalpedia.com/1/index.php/jmd/article/view/1610>
- Hermanto, S. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.
- Jenia, S. (2022). Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2022. *Jurnal Valtech*, 7(2). <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/valtech/article/view/10828>
- Maghdalena, M., Syaukat, Y., Falatehan, F., & Hakim, D. (2022). Tinjauan Implementasi Program Food Estate Dan Prospeknya Di Merauke Papua. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40(2).
- Martanto, E. (2022). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Papua. CV Andi Offset.
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. (2022).
- Salindeho, G., & Intan, I. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3). <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/3347>

- Ulahayanan, C., Pakasi, U., & Mujtahid, I. (2024). Implementasi kebijakan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mappi. *Musamus Journal Public Administration*, 7(1). <https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i1.6306>
- Yanti, R., Handayani, R., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4).<https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/627>
- Zesa, Y. (2024). Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Bidang Investasi Di Kabupaten Merauke. *Animha Law Journal*, 1(1). <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/alj/article/view/>